

Katalog : 7203003.63



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



<https://kcs>

**STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022**

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 - 2022

ISSN. 2460 - 3031

No. Publikasi: 63000.2324

Katalog BPS: 7203003.63

Ukuran Buku: 29,7 x 21,5 cm

Jumlah Halaman: x + 28 Halaman

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Dicetak Oleh:

CV. Karya Bintang Muslim

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya publikasi "**Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022**". Publikasi ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya.

Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2021 dan data anggaran tahun 2022. Data tersebut merupakan hasil kompilasi data yang diterima dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui BPS daerah.

Dalam publikasi ini disertakan pula penjelasan tentang konsep definisi dan metode pengumpulan data guna mempermudah pemahaman para pemakai data. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para konsumen data, baik untuk keperluan perencanaan dan analisis maupun evaluasi perkembangan perekonomian secara umum.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna dan belum mencukupi kebutuhan pemakai secara maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran pengguna data sangat diperlukan guna penyempurnaan publikasi pada masa yang akan datang.

Banjarbaru, Juli 2023

Kepala,



Martin Wibisono

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
1. PENJELASAN UMUM.....	1
1.1 PENDAHULUAN.....	1
1.2 RUANG LINGKUP SURVEI	1
1.3 KONSEP DAN DEFINISI	1
2. ULASAN RINGKAS	5
2.1 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5
2.2 PENDAPATAN DAERAH.....	6
2.3 PENGELUARAN DAERAH.....	9
3. LAMPIRAN.....	13

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
TABEL a. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2021 - 2022	6
TABEL b. DISTRIBUSI REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA MENURUT JENIS PENERIMAAN 2021 - 2022	7
TABEL c. DISTRIBUSI PERSENTASE REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA MENURUT JENIS PENGELUARAN 2021 - 2022	8

<https://kalsel.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	HALAMAN
TABEL 1. PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022 (ribu rupiah)	15
TABEL 2. PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022 (ribu rupiah) Kabupaten Tanah Laut	16
TABEL 3. PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022 (ribu rupiah) Kabupaten Kotabaru	17
TABEL 4. PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022 (ribu rupiah) Kabupaten Banjar	18
TABEL 5. PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022 (ribu rupiah) Kabupaten Barito Kuala	19
TABEL 6. PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022 (ribu rupiah) Kabupaten Tapin	20
TABEL 7. PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022 (ribu rupiah) Kabupaten Hulu Sungai Selatan	21
TABEL 8. PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022 (ribu rupiah) Kabupaten Hulu Sungai Tengah	22
TABEL 9. PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022 (ribu rupiah) Kabupaten Hulu Sungai Utara	23
TABEL 10. PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022 (ribu rupiah) Kabupaten Tabalong	24
TABEL 11. PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022 (ribu rupiah) Kabupaten Tanah Bumbu	25
TABEL 12. PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022 (ribu rupiah) Kabupaten Balangan	26
TABEL 13. PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022 (ribu rupiah) Kota Banjarmasin	27
TABEL 14. PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022 (ribu rupiah) Kota Banjarbaru	28

1. PENJELASAN UMUM

1.1. Pendahuluan

Peran pemerintahan Kabupaten/Kota dalam proses pembangunan di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Hal mendasar yang menjadi perhatian adalah kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyelenggarakan aktivitas di wilayahnya. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kebijakan yang tepat membuat pemerintah mampu melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Dengan melihat potensi suatu daerah dari sisi pendapatan dan pengeluaran, maka kebijakan yang tepat dapat disusun, baik oleh pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Sehubungan dengan itu, perlu disusun publikasi Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini, dengan harapan dapat menggambarkan seluruh potensi Kabupaten/Kota agar dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang terarah dan tepat sasaran. Publikasi ini menyajikan data realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2021, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Data publikasi ini berasal dari hasil Survei Statistik Keuangan Pemerintah (K-2) yang dilaksanakan setiap tahun oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

1.2. Ruang Lingkup Survei

Data pendapatan dan belanja kabupaten/kota dikumpulkan dari Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota di tiap-tiap kabupaten/kota.

1.3. Konsep dan Definisi

Daftar isian keuangan daerah kabupaten/kota (K-2) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan menyangkut realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam daftar isian tersebut terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait dengan struktur laporan keuangan kabupaten/kota yang sudah baku. Berikut ini beberapa penjelasan konsep dan definisi dalam daftar isian K-2 :

1.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan lain-lain.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, biaya KTP dan akte catatan sipil, pelayanan pemakaman, pelayanan parkir tepi jalan umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pelayanan pendidikan. Retribusi jasa usaha mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga dan sejenisnya. Retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari Pemerintah Pusat dan atau dari Instansi Pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

1.3.2. Belanja Daerah

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

I.3.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan lain-lain.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah, juga pada publikasi ini pembiayaan daerah mencakup SILPA tahun berjalan.

2. ULASAN RINGKAS

2.1. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 merupakan gambaran langkah kongkret pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian di daerahnya masing-masing agar dapat tumbuh terus dari tahun ke tahun. Dari data Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 diketahui bahwa pada tahun 2022 perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan ini naik jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 3,48 persen.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menaikkan belanja pemerintah. Untuk mengimbangnya, Pemda mengupayakan peningkatan pendapatan daerah dengan memberikan perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD harus dapat dikelola daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sehingga dalam upaya penggalian sumber pendapatannya Pemda tidak mendistorsi perekonomian. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada Pemda dalam mengatur keuangan daerahnya, harus dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat ini memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah hingga mencapai lebih dari 50 persen. Sumber penerimaan yang lain adalah lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah dalam APBD 2022, jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya mengalami penurunan dari 17,706 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 16,879 triliun rupiah pada tahun 2022 atau turun sebesar 4,67 persen. Dari sisi pendapatan asli daerah, terlihat adanya penurunan sebesar 8,61 persen, yaitu dari 2,500 triliun rupiah pada tahun 2021 diperkirakan menjadi 2,285 triliun rupiah pada tahun 2022. Penurunan pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh penurunan lain-lain PAD yang sah sebesar 18,96 persen.

Tabel a.
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(ribu rupiah)
2021 - 2022

Rincian	2021	2022 *)	Perubahan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	17.706.260.612	16.879.031.437	- 4,67
1. Pendapatan Asli Daerah	2.500.601.540	2.285.190.539	- 8,61
2. Pendapatan Transfer	14.669.493.782	14.333.691.433	- 2,29
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	536.165.290	259.879.465	- 51,53
B. BELANJA DAERAH	18.857.904.108	19.265.854.794	2,16
1. Belanja Operasi	12.858.785.746	13.724.499.786	6,73
2. Belanja Modal	3.444.619.723	3.230.117.562	- 6,23
3. Belanja Tidak Terduga	125.972.371	171.896.991	36,46
4. Belanja Transfer	2.428.526.268	2.139.340.455	- 11,91
C. PEMBIAYAAN DAERAH	3.387.928.130	2.637.586.390	- 22,15

*) Data APBD

2.2. Pendapatan Daerah

Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. *Pertama*, pemerintah daerah kabupaten/kota memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Kedua*, memperoleh transfer dana dari APBN yang di alokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. *Ketiga*, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontingensi dan bantuan dana darurat.

Jika dilihat dari pendapatan daerah, tampak bahwa pada APBD 2022 diperkirakan akan mengalami penurunan dari realisasi pendapatan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2021, yaitu dari 17,706 triliun rupiah menjadi 16,879 triliun rupiah atau turun 4,67 persen.

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian kabupaten/kota dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang kondusif juga akan menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk berinvestasi.

Tabel b.
Distribusi Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Menurut Jenis Penerimaan
(persen)
2021 - 2022

Jenis Penerimaan (1)	2021 (2)	2022 *) (3)
PENDAPATAN DAERAH	100,00	100,00
Pendapatan Asli Daerah	14,12	13,54
1. Pajak Daerah	4,25	4,55
2. Retribusi Daerah	0,61	0,89
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,70	0,82
4. Lain-Lain PAD yang Sah	8,56	7,28
Pendapatan Transfer	82,85	84,92
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	76,16	76,13
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	6,69	8,79
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3,03	1,54
1. Pendapatan Hibah	0,95	0,54
2. Dana Darurat	0,00	0,00
3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	2,08	1,00

*) Data APBD

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 terhadap total penerimaan daerah diperkirakan akan mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yaitu dari 14,12 persen menjadi 13,54 persen. Jika dilihat dari nilai nominalnya PAD mengalami penurunan yaitu dari 2,500 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 2,285 triliun rupiah pada tahun 2022 atau turun sebesar 8,61 persen. Penurunan tersebut terutama karena turunnya lain-lain PAD yang sah dari 1,516 triliun tahun 2021 menjadi 1,228 triliun tahun 2022 atau turun 18,96 persen. Bila dilihat dari kontribusinya terhadap penerimaan daerah tahun 2022, 4,55 persen disumbang dari pajak daerah, sedangkan dari retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah masing-masing sebesar 0,89 persen, 0,82 persen, dan 7,28 persen.

2.2.2. Pendapatan Transfer

Dari tabel b dapat dilihat bahwa penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota kontribusi kenaikan terbesarnya disumbang dari Pendapatan Transfer, dimana pada APBD 2022 kontribusinya diperkirakan sebesar 84,92 persen dari total penerimaan lebih besar dari kontribusi tahun 2021 yang mencapai 82,85 persen. Komponen penyumbang kenaikan terbesarnya adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan kontribusi sebesar 76,13 persen dengan nilai nominal sebesar 12,849 triliun rupiah dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 8,79 persen dengan nilai nominal sebesar 1,484 triliun.

2.2.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan dari 536,165 milyar rupiah pada tahun 2021 menjadi 259,879 milyar rupiah pada tahun 2022 atau turun sebesar 51,53 persen, dengan kontribusi terhadap penerimaan dari 3,03 persen pada tahun 2021 menjadi 1,54 persen pada tahun 2022. Penerimaan lainnya ini terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sedangkan belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi bersifat jangka pendek atau masa habis manfaatnya adalah satu tahun anggaran. Selain itu, pada hal tertentu bersifat belanja rutin atau berulang. Belanja operasi terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Adapun belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Terakhir, belanja transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Seperti halnya total penerimaan daerah, pada APBD 2022, total pengeluaran juga mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 1,54 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat terlihat pada tabel 1 (Lampiran), dimana pengeluaran daerah Kalimantan Selatan tahun 2021 adalah sebesar 22,246 triliun rupiah, sedangkan pengeluaran daerah pada tahun 2022 adalah sebesar 21,903 triliun rupiah. Pengeluaran daerah didominasi oleh naiknya belanja operasi dimana sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 12,859 triliun rupiah, namun pada tahun 2022 naik menjadi 13,724 triliun rupiah, atau naik sebanyak 2,16 persen. Kenaikan terbesar adalah pada belanja tidak terduga yang diperkirakan naik sebesar 36,46 persen dari tahun sebelumnya sebesar 125,972 milyar rupiah tahun 2021 menjadi 171,897 milyar rupiah pada tahun 2022. Berbeda dengan pengeluaran daerah, pembiayaan daerah pada tahun 2022 ini diharapkan dapat berhemat sebesar 22,15 persen dari tahun 2021, dimana pada tahun 2021 yang lalu pengeluaran pembiayaan daerah mencapai 3,388 triliun rupiah namun pada tahun 2022 anggaran pengeluaran pembiayaan daerah diperkirakan sebesar 2,638 triliun rupiah.

Dilihat dari kontribusinya, belanja operasi memiliki kontribusi terbesar dalam pengeluaran daerah dengan kontribusi sebesar 62,66 persen pada tahun 2022. Sementara pada realisasi tahun 2021, belanja operasi memiliki kontribusi sebesar 57,80 persen. Sedangkan untuk belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer masing-masing memberikan kontribusi sebesar 14,75 persen, 0,78 persen, dan 9,77 persen dari seluruh total pengeluaran daerah tahun 2022.

Tabel c.
Distribusi Persentase Realisasi Pengeluaran
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Menurut Jenis Pengeluaran
(persen)
2021 - 2022

Jenis Penerimaan	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)
PENGELUARAN DAERAH	100,00	100,00
BELANJA DAERAH	84,77	87,96
Belanja Operasi	57,80	62,66
1. Belanja Pegawai	30,95	33,75
2. Belanja Barang dan Jasa	24,21	26,44
3. Belanja Bunga	0,04	0,11
4. Belanja Subsidi	0,00	0,00
5. Belanja Hibah	2,08	1,89
6. Belanja Bantuan Sosial	0,52	0,47
Belanja Modal	15,48	14,75
Belanja Tidak Terduga	0,57	0,78
Belanja Transfer	10,92	9,77
1. Belanja Bagi Hasil	0,21	0,19
2. Belanja Bantuan Keuangan	10,71	9,58
PEMBIAYAAN DAERAH	15,23	12,04

*) Data APBD

2.3.1. Belanja Operasi

Pada bagian Belanja Operasi, terlihat bahwa distribusi persentase belanja pegawai menyumbangkan peranan yang paling besar terhadap total pengeluaran daerah yaitu sebesar 30,95 persen pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan menjadi 33,75 persen pada tahun 2022 dengan nilai nominal sebesar 6,885 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 7,392 triliun rupiah pada tahun 2022. Pengeluaran kedua terbesar pada bagian ini adalah dari belanja barang dan jasa yang mengalami kenaikan dari 24,21 persen pada tahun 2021 menjadi 26,44 persen pada tahun 2022.

2.3.2. Belanja Modal

Distribusi persentase belanja modal juga menyumbangkan peranan yang besar terhadap total pengeluaran daerah yaitu sebesar 14,78 persen pada APBD 2022, namun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai nominal sebesar 3,444 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 3,230 triliun rupiah pada tahun 2022.

2.3.3. Belanja Tidak Terduga

Untuk belanja tidak terduga, distribusi persentase belanja ini adalah sebesar 0,57 persen pada tahun 2021, dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 0,78 dari total seluruh pengeluaran.

2.3.4. Belanja Transfer

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja transfer ini juga menyumbangkan kontribusi besar terhadap total pengeluaran daerah yaitu sebesar 2,428 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 2,139 triliun rupiah pada tahun 2022. Bagian belanja bantuan keuangan memberikan sumbangan besar, yaitu 9,58 persen pada APBD 2022. Sedangkan belanja bagi hasil memberikan sumbangan sebesar 0,19 persen.

2.3.5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah pada APBN 2022 diperkirakan mengalami penurunan, yaitu sebesar 3,387 triliun rupiah pada realisasi APBD 2021 menjadi 2,637 miliar rupiah pada APBD 2022 atau turun sebesar 22,15 persen (lihat lampiran Tabel 1).

TABEL 1 PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022
 (ribu rupiah)

Rincian	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	17.706.260.612	16.879.031.437
1. Pendapatan Asli Daerah	2.500.601.540	2.285.190.539
1.1. Pajak Daerah	752.649.813	767.884.502
1.2. Retribusi Daerah	108.775.175	150.420.340
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	123.131.486	138.344.034
1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	1.516.045.066	1.228.541.663
2. Pendapatan Transfer	14.669.493.782	14.333.961.433
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	13.484.741.725	12.849.591.325
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.184.752.057	1.484.370.108
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	536.165.290	259.879.465
3.1. Pendapatan Hibah	167.789.767	90.717.662
3.2. Dana Darurat	-	-
3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	368.375.523	169.161.803
PENGELUARAN DAERAH	22.245.832.238	21.903.441.184
A. BELANJA DAERAH	18.857.904.108	19.265.854.794
1. Belanja Operasi	12.858.785.746	13.724.499.786
1.1. Belanja Pegawai	6.885.366.187	7.392.908.458
1.2. Belanja Barang dan Jasa	5.386.034.434	5.790.735.025
1.3. Belanja Bunga	9.238.943	23.385.153
1.4. Belanja Subsidi	0	0
1.5. Belanja Hibah	461.862.687	414.853.293
1.6. Belanja Bantuan Sosial	116.283.495	102.617.857
2. Belanja Modal	3.444.619.723	3.230.117.562
3. Belanja Tidak Terduga	125.972.371	171.896.991
4. Belanja Transfer	2.428.526.268	2.139.340.455
4.1. Belanja Bagi Hasil	46.512.279	41.542.866
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	2.382.013.989	2.097.797.589
PEMBIAYAAN DAERAH	3.387.928.130	2.637.586.390

*) Data APBD

TABEL 2 PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Tanah Laut

Rincian	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.522.201.391	1.494.508.572
1. Pendapatan Asli Daerah	206.135.631	168.281.561
1.1. Pajak Daerah	43.638.423	36.575.000
1.2. Retribusi Daerah	5.743.153	7.936.345
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.836.677	14.626.000
1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	146.917.378	109.144.216
2. Pendapatan Transfer	1.273.749.541	1.326.227.011
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.174.467.044	1.215.977.011
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.282.497	110.250.000
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	42.316.219	-
3.1. Pendapatan Hibah	3.203.439	-
3.2. Dana Darurat	-	-
3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	39.112.780	-
PENGELUARAN DAERAH	2.890.224.651	2.025.215.971
A. BELANJA DAERAH	1.894.067.926	1.635.547.777
1. Belanja Operasi	1.214.778.643	1.201.672.073
1.1. Belanja Pegawai	639.840.570	668.901.001
1.2. Belanja Barang dan Jasa	505.996.286	483.300.050
1.3. Belanja Bunga	0	0
1.4. Belanja Subsidi	0	0
1.5. Belanja Hibah	53.691.497	37.206.222
1.6. Belanja Bantuan Sosial	15.250.290	12.264.800
2. Belanja Modal	443.098.788	187.422.954
3. Belanja Tidak Terduga	6.471.572	22.626.879
4. Belanja Transfer	229.718.923	223.825.871
4.1. Belanja Bagi Hasil	5.183.544	4.451.135
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	224.535.379	219.374.736
PEMBIAYAAN DAERAH	996.156.725	389.668.194

*) Data APBD

TABEL 3 PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Kotabaru

Rincian	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.617.788.354	1.466.341.312
1. Pendapatan Asli Daerah	203.794.858	130.238.223
1.1. Pajak Daerah	61.601.123	55.597.293
1.2. Retribusi Daerah	5.975.310	6.114.935
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.945.870	12.670.000
1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	126.272.555	55.855.995
2. Pendapatan Transfer	1.363.856.318	1.336.103.089
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.264.025.706	1.220.282.865
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.830.612	115.820.224
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	50.137.178	-
3.1. Pendapatan Hibah	50.137.178	-
3.2. Dana Darurat	-	-
3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
PENGELUARAN DAERAH	1.647.806.628	1.634.050.078
A. BELANJA DAERAH	1.525.538.870	1.549.128.673
1. Belanja Operasi	1.013.342.303	1.122.741.884
1.1. Belanja Pegawai	576.213.153	604.652.885
1.2. Belanja Barang dan Jasa	378.174.334	452.442.976
1.3. Belanja Bunga	0	0
1.4. Belanja Subsidi	0	0
1.5. Belanja Hibah	42.610.983	48.189.800
1.6. Belanja Bantuan Sosial	16.343.833	17.456.223
2. Belanja Modal	266.830.705	171.389.078
3. Belanja Tidak Terduga	2.330.782	5.000.000
4. Belanja Transfer	243.035.080	249.997.711
4.1. Belanja Bagi Hasil	5.439.383	5.575.000
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	237.595.697	244.422.711
PEMBIAYAAN DAERAH	122.267.758	84.921.405

*) Data APBD

TABEL 4 PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Banjar

Rincian	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.696.983.325	1.284.581.305
1. Pendapatan Asli Daerah	217.359.727	221.010.478
1.1. Pajak Daerah	81.008.711	82.145.127
1.2. Retribusi Daerah	5.921.676	7.020.131
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.596.447	11.480.575
1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	124.832.893	120.364.645
2. Pendapatan Transfer	1.423.838.919	1.012.087.616
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.321.807.958	881.326.563
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	102.030.961	130.761.053
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	55.784.679	51.483.211
3.1. Pendapatan Hibah	55.784.679	-
3.2. Dana Darurat	-	-
3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	51.483.211
PENGELUARAN DAERAH	1.864.788.983	1.659.700.829
A. BELANJA DAERAH	1.732.416.552	1.472.141.066
1. Belanja Operasi	1.213.427.712	1.221.269.035
1.1. Belanja Pegawai	741.214.750	750.664.298
1.2. Belanja Barang dan Jasa	430.830.449	443.672.813
1.3. Belanja Bunga	0	0
1.4. Belanja Subsidi	0	0
1.5. Belanja Hibah	37.248.886	22.603.224
1.6. Belanja Bantuan Sosial	4.133.627	4.328.700
2. Belanja Modal	181.251.166	123.168.575
3. Belanja Tidak Terduga	4.813.008	5.000.000
4. Belanja Transfer	332.924.666	122.703.456
4.1. Belanja Bagi Hasil	5.763.635	8.916.526
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	327.161.031	113.786.930
PEMBIAYAAN DAERAH	132.372.431	187.559.763

*) Data APBD

TABEL 5 PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Barito Kuala

Rincian	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.282.148.033	1.275.642.036
1. Pendapatan Asli Daerah	108.665.931	67.036.210
1.1. Pajak Daerah	31.287.211	23.329.653
1.2. Retribusi Daerah	4.181.236	9.042.245
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.156.591	8.470.800
1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	65.040.893	26.193.512
2. Pendapatan Transfer	1.125.334.277	1.199.196.005
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.058.065.420	1.121.146.005
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.268.857	78.050.000
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	48.147.825	9.409.821
3.1. Pendapatan Hibah	8.777.100	3.170.772
3.2. Dana Darurat	-	-
3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	39.370.725	6.239.049
PENGELUARAN DAERAH	1.378.934.765	1.322.342.036
A. BELANJA DAERAH	1.273.507.651	1.298.992.036
1. Belanja Operasi	843.812.011	835.634.422
1.1. Belanja Pegawai	548.249.587	553.740.710
1.2. Belanja Barang dan Jasa	270.534.406	257.212.339
1.3. Belanja Bunga	0	0
1.4. Belanja Subsidi	0	0
1.5. Belanja Hibah	24.761.418	24.520.273
1.6. Belanja Bantuan Sosial	266.600	161.100
2. Belanja Modal	207.541.135	241.371.174
3. Belanja Tidak Terduga	2.143.854	5.000.000
4. Belanja Transfer	220.010.651	216.986.440
4.1. Belanja Bagi Hasil	3.448.829	2.843.780
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	216.561.822	214.142.660
PEMBIAYAAN DAERAH	105.427.114	23.350.000

*) Data APBD

TABEL 6 PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Tapin

Rincian	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.202.139.964	1.101.005.112
1. Pendapatan Asli Daerah	121.443.141	76.958.155
1.1. Pajak Daerah	29.439.687	19.450.000
1.2. Retribusi Daerah	2.337.412	4.570.465
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.701.395	5.000.000
1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	84.964.647	47.937.690
2. Pendapatan Transfer	1.050.230.494	988.012.669
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	977.176.119	837.218.848
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.054.375	150.793.821
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	30.466.329	36.034.288
3.1. Pendapatan Hibah	9.109.587	7.624.725
3.2. Dana Darurat	-	-
3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.356.742	28.409.563
PENGELUARAN DAERAH	1.942.902.977	2.266.096.904
A. BELANJA DAERAH	1.506.125.212	1.683.551.008
1. Belanja Operasi	873.848.686	954.227.830
1.1. Belanja Pegawai	422.170.852	506.900.664
1.2. Belanja Barang dan Jasa	381.394.335	393.117.455
1.3. Belanja Bunga	1.948.221	7.782.683
1.4. Belanja Subsidi	0	0
1.5. Belanja Hibah	63.673.128	41.598.820
1.6. Belanja Bantuan Sosial	4.662.150	4.828.208
2. Belanja Modal	442.233.856	539.670.180
3. Belanja Tidak Terduga	14.008.130	25.000.000
4. Belanja Transfer	176.034.540	164.652.998
4.1. Belanja Bagi Hasil	2.039.313	2.402.046
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	173.995.227	162.250.952
PEMBIAYAAN DAERAH	436.777.765	582.545.896

*) Data APBD

TABEL 7 PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Hulu Sungai Selatan

Rincian	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.342.594.284	1.213.070.017
1. Pendapatan Asli Daerah	247.697.935	228.196.140
1.1. Pajak Daerah	13.543.127	16.518.460
1.2. Retribusi Daerah	6.608.176	9.142.544
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.091.259	5.004.500
1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	221.455.373	197.530.636
2. Pendapatan Transfer	1.072.252.216	961.957.897
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.003.434.646	885.948.108
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.817.570	76.009.789
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.644.133	22.915.980
3.1. Pendapatan Hibah	55.025	1.025.200
3.2. Dana Darurat	-	-
3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.589.108	21.890.780
PENGELUARAN DAERAH	1.723.136.483	1.534.566.780
A. BELANJA DAERAH	1.420.783.809	1.373.818.398
1. Belanja Operasi	970.121.279	1.070.328.351
1.1. Belanja Pegawai	482.702.665	582.830.812
1.2. Belanja Barang dan Jasa	444.359.498	443.353.374
1.3. Belanja Bunga	0	0
1.4. Belanja Subsidi	0	0
1.5. Belanja Hibah	25.458.598	25.241.029
1.6. Belanja Bantuan Sosial	17.600.518	18.903.136
2. Belanja Modal	260.921.216	101.811.447
3. Belanja Tidak Terduga	4.408.917	18.154.705
4. Belanja Transfer	185.332.397	183.523.895
4.1. Belanja Bagi Hasil	2.628.865	2.628.865
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	182.703.532	180.895.030
PEMBIAYAAN DAERAH	302.352.674	160.748.382

*) Data APBD

TABEL 8 PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022
(ribu rupiah)

Kabupaten : Hulu Sungai Tengah

Rincian	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.112.074.210	1.151.937.391
1. Pendapatan Asli Daerah	124.333.322	136.347.528
1.1. Pajak Daerah	11.571.389	13.172.070
1.2. Retribusi Daerah	10.508.734	13.481.703
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.145.711	5.000.000
1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	96.107.488	104.693.755
2. Pendapatan Transfer	943.881.426	1.001.486.453
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	877.655.761	921.486.453
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.225.665	80.000.000
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	43.859.462	14.103.410
3.1. Pendapatan Hibah	9.093.487	14.103.410
3.2. Dana Darurat	-	-
3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	34.765.975	-
PENGELUARAN DAERAH	1.324.146.417	1.506.328.384
A. BELANJA DAERAH	1.162.809.816	1.329.132.888
1. Belanja Operasi	866.434.315	1.000.128.991
1.1. Belanja Pegawai	503.900.951	537.543.725
1.2. Belanja Barang dan Jasa	330.241.084	401.844.520
1.3. Belanja Bunga	0	0
1.4. Belanja Subsidi	0	0
1.5. Belanja Hibah	26.644.223	49.747.774
1.6. Belanja Bantuan Sosial	5.648.057	10.992.972
2. Belanja Modal	100.475.370	129.829.924
3. Belanja Tidak Terduga	4.084.755	9.750.000
4. Belanja Transfer	191.815.376	189.423.973
4.1. Belanja Bagi Hasil	1.976.747	2.850.525
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	189.838.629	186.573.448
PEMBIAYAAN DAERAH	161.336.601	177.195.496

*) Data APBD

TABEL 9 PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Hulu Sungai Utara

Rincian	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.096.449.134	990.817.341
1. Pendapatan Asli Daerah	123.548.008	120.243.760
1.1. Pajak Daerah	11.118.415	11.000.000
1.2. Retribusi Daerah	7.219.171	9.544.540
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.168.983	7.500.000
1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	96.041.439	92.199.220
2. Pendapatan Transfer	956.196.509	870.573.581
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	894.993.766	814.991.369
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.202.743	55.582.212
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.704.617	-
3.1. Pendapatan Hibah	655.185	-
3.2. Dana Darurat	-	-
3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.049.432	-
PENGELUARAN DAERAH	1.397.469.632	1.611.670.183
A. BELANJA DAERAH	1.215.368.679	1.301.243.762
1. Belanja Operasi	766.594.101	830.235.176
1.1. Belanja Pegawai	429.446.924	494.458.336
1.2. Belanja Barang dan Jasa	293.129.395	304.357.191
1.3. Belanja Bunga	1.889.998	10.000.000
1.4. Belanja Subsidi	0	0
1.5. Belanja Hibah	33.720.784	15.825.599
1.6. Belanja Bantuan Sosial	8.407.000	5.594.050
2. Belanja Modal	196.896.045	248.294.245
3. Belanja Tidak Terduga	3.146.284	10.000.000
4. Belanja Transfer	248.732.249	212.714.341
4.1. Belanja Bagi Hasil	2.136.000	2.060.000
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	246.596.249	210.654.341
PEMBIAYAAN DAERAH	182.100.953	310.426.421

*) Data APBD

TABEL 10 PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022
(ribu rupiah)

Kabupaten : Tabalong

Rincian	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.398.726.755	1.300.413.454
1. Pendapatan Asli Daerah	185.957.027	186.292.929
1.1. Pajak Daerah	69.633.812	77.419.153
1.2. Retribusi Daerah	7.299.173	7.228.197
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.799.099	13.800.000
1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	96.224.943	87.845.579
2. Pendapatan Transfer	1.172.798.032	1.105.020.525
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.065.782.091	979.369.738
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.015.941	125.650.787
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	39.971.696	9.100.000
3.1. Pendapatan Hibah	9.054.710	9.100.000
3.2. Dana Darurat	-	-
3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.916.986	-
PENGELUARAN DAERAH	1.701.252.437	1.630.303.080
A. BELANJA DAERAH	1.480.610.083	1.465.358.267
1. Belanja Operasi	1.016.787.045	1.033.860.701
1.1. Belanja Pegawai	492.449.302	587.802.163
1.2. Belanja Barang dan Jasa	473.862.177	421.083.082
1.3. Belanja Bunga	0	0
1.4. Belanja Subsidi	0	0
1.5. Belanja Hibah	34.203.166	15.557.956
1.6. Belanja Bantuan Sosial	16.272.400	9.417.500
2. Belanja Modal	254.822.134	225.588.409
3. Belanja Tidak Terduga	14.739.210	18.716.234
4. Belanja Transfer	194.261.694	187.192.923
4.1. Belanja Bagi Hasil	7.954.000	8.465.000
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	186.307.694	178.727.923
PEMBIAYAAN DAERAH	220.642.354	164.944.813

*) Data APBD

TABEL 11 PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022
(ribu rupiah)

Kabupaten : Tanah Bumbu

Rincian	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.664.670.905	1.657.017.192
1. Pendapatan Asli Daerah	158.296.425	180.234.518
1.1. Pajak Daerah	49.906.084	63.524.577
1.2. Retribusi Daerah	7.019.523	14.728.738
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.922.464	3.348.467
1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	96.448.354	98.632.736
2. Pendapatan Transfer	1.448.929.337	1.389.817.920
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.326.597.199	1.279.295.960
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	122.332.138	110.521.960
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	57.445.143	86.964.754
3.1. Pendapatan Hibah	15.142.667	44.693.554
3.2. Dana Darurat	-	-
3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.302.476	42.271.200
PENGELUARAN DAERAH	1.954.646.986	1.927.017.188
A. BELANJA DAERAH	1.798.948.467	1.792.017.188
1. Belanja Operasi	1.187.908.098	1.149.206.501
1.1. Belanja Pegawai	505.018.467	439.715.258
1.2. Belanja Barang dan Jasa	627.359.918	646.557.623
1.3. Belanja Bunga	0	0
1.4. Belanja Subsidi	0	0
1.5. Belanja Hibah	53.604.713	60.341.120
1.6. Belanja Bantuan Sosial	1.925.000	2.592.500
2. Belanja Modal	336.669.279	428.479.264
3. Belanja Tidak Terduga	49.241.860	10.000.000
4. Belanja Transfer	225.129.230	204.331.423
4.1. Belanja Bagi Hasil	8.568.930	0
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	216.560.300	204.331.423
PEMBIAYAAN DAERAH	155.698.519	135.000.000

*) Data APBD

TABEL 12 PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Balangan

Rincian	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.085.377.648	1.098.008.355
1. Pendapatan Asli Daerah	130.505.127	79.961.793
1.1. Pajak Daerah	11.417.072	11.765.023
1.2. Retribusi Daerah	1.890.123	1.733.889
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.391.951	10.847.692
1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	104.805.981	55.615.189
2. Pendapatan Transfer	928.215.278	988.178.562
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	869.042.359	911.480.195
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.172.919	76.698.367
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	26.657.243	29.868.000
3.1. Pendapatan Hibah	6.776.710	11.000.000
3.2. Dana Darurat	-	-
3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.880.533	18.868.000
PENGELUARAN DAERAH	1.235.913.673	1.367.272.979
A. BELANJA DAERAH	1.094.695.917	1.232.640.667
1. Belanja Operasi	741.000.175	826.504.641
1.1. Belanja Pegawai	356.909.206	408.470.646
1.2. Belanja Barang dan Jasa	362.967.884	384.444.919
1.3. Belanja Bunga	0	0
1.4. Belanja Subsidi	0	0
1.5. Belanja Hibah	16.122.460	29.589.033
1.6. Belanja Bantuan Sosial	5.000.625	4.000.043
2. Belanja Modal	163.777.645	208.648.602
3. Belanja Tidak Terduga	8.386.635	13.500.000
4. Belanja Transfer	181.531.462	183.987.424
4.1. Belanja Bagi Hasil	1.373.033	1.349.989
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	180.158.429	182.637.435
PEMBIAYAAN DAERAH	141.217.756	134.632.312

*) Data APBD

TABEL 13 PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022
 (ribu rupiah)

Kota : Banjarmasin

Rincian	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.578.707.401	1.774.392.474
1. Pendapatan Asli Daerah	352.317.325	405.899.646
1.1. Pajak Daerah	198.878.947	218.500.000
1.2. Retribusi Daerah	33.470.957	47.700.000
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.418.743	33.000.000
1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	93.548.678	106.699.646
2. Pendapatan Transfer	1.158.562.309	1.368.492.828
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	989.697.417	1.094.862.498
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	168.864.892	273.630.330
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	67.827.767	-
3.1. Pendapatan Hibah	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-
3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	67.827.767	-
PENGELUARAN DAERAH	1.883.378.021	2.320.521.601
A. BELANJA DAERAH	1.631.952.649	2.047.457.038
1. Belanja Operasi	1.275.181.858	1.587.343.460
1.1. Belanja Pegawai	729.363.876	808.370.514
1.2. Belanja Barang dan Jasa	495.108.182	744.798.357
1.3. Belanja Bunga	0	0
1.4. Belanja Subsidi	0	0
1.5. Belanja Hibah	37.157.075	31.288.589
1.6. Belanja Bantuan Sosial	13.552.725	2.886.000
2. Belanja Modal	350.064.775	444.971.678
3. Belanja Tidak Terduga	6.706.016	15.141.900
4. Belanja Transfer	0	0
4.1. Belanja Bagi Hasil	0	0
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	0	0
PEMBIAYAAN DAERAH	251.425.372	273.064.563

*) Data APBD

TABEL 14 PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021 - 2022
 (ribu rupiah)

Kota : Banjarbaru

Rincian	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.106.399.204	1.071.296.876
1. Pendapatan Asli Daerah	320.547.080	284.489.599
1.1. Pajak Daerah	139.605.812	138.888.146
1.2. Retribusi Daerah	10.600.529	12.176.611
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.956.296	7.596.000
1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	163.384.443	125.828.842
2. Pendapatan Transfer	751.649.125	786.807.277
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	661.996.239	686.205.713
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	89.652.886	100.601.564
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	34.202.999	-
3.1. Pendapatan Hibah	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-
3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	34.202.999	-
PENGELUARAN DAERAH	1.301.230.580	1.098.355.166
A. BELANJA DAERAH	1.121.078.473	1.084.826.021
1. Belanja Operasi	875.549.519	891.346.717
1.1. Belanja Pegawai	457.885.884	448.857.445
1.2. Belanja Barang dan Jasa	392.076.488	414.550.325
1.3. Belanja Bunga	5.400.723	5.602.469
1.4. Belanja Subsidi	0	0
1.5. Belanja Hibah	12.965.755	13.143.853
1.6. Belanja Bantuan Sosial	7.220.669	9.192.625
2. Belanja Modal	240.037.606	179.472.031
3. Belanja Tidak Terduga	5.491.348	14.007.273
4. Belanja Transfer	0	0
4.1. Belanja Bagi Hasil	0	0
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	0	0
PEMBIAYAAN DAERAH	180.152.107	13.529.145

*) Data APBD

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://kassel.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jl. Soekarno-Hatta (Jalur Trikora) No. 7 Banjarbaru 70713
Telp. (0511) 6749001, Fax. (0511) 6749106
Email: bps6300@bps.go.id

